



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **NOTA PENJELASAN GUBERNUR MENGENAI PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,*

**Yang Kami Mulyakan,**

Pimpinan dan Para Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur;

**Yang Kami Hormati,**

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi  
Jawa Timur;

Segenap Ketua dan Anggota Komisi-Komisi dan Fraksi-Fraksi DPRD  
Provinsi Jawa Timur;

Para Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Para Undangan dari Wakil Institusi/Lembaga/Organisasi  
di Jawa Timur;

Pertama-tama, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadiran ALLAH Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA kita diberikan kesehatan tak kurang suatu apapun, sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna

**NOTA PENJELASAN GUBERNUR MENGENAI PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.** Semoga apa yang kita lakukan saat ini memperoleh ridho dari ALLAH Subhanahu Wata'ala.

Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan apresiasi dan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasi positif dari Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Seluruh Jajaran Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Pihak Swasta serta seluruh elemen masyarakat yang turut aktif mendorong pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang kami canangkan sehingga secara nyata memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja pembangunan Jawa Timur pada tahun 2017.

***PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI  
HORMATI,***

Laporan pertanggungjawaban tahun 2017 ini disampaikan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Masyarakat. Ketentuan Undang-Undang dimaksud secara operasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 pasal 17 ayat 1 dengan perihal yang sama.

Pada laporan kinerja tahun 2017 ini perlu Saya sampaikan kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, ada perubahan terhadap pengukuran kinerja dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi 11 (sebelas) IKU. Hal ini dilakukan karena seiring dengan adanya perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan Jawa Timur sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama dan target kinerja

pembangunan daerah. *Pertama*, perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (*System National Account*) 2008, maka cakupan sektor semakin luas, terbagi menjadi 19 (sembilan belas) sektor lapangan usaha dan perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, di mana angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean* yang diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capain dimensi lain, sehingga untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi (pendidikan, kesehatan dan daya beli) harus memperoleh perhatian yang sama besar.

*Kedua*, berkembangnya isu global yang berdampak terhadap penurunan kinerja ekonomi Nasional Indonesia. Di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (*tapering off quantitative easing*) oleh The Fed juga berpengaruh ke seluruh dunia.

*Ketiga*, berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya

mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional.

*Keempat*, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya perubahan target capaian kinerja tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan perubahan atas PERDA Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 menjadi PERDA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dasar hukum dari perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 282, yang intinya memperbolehkan dilakukan perubahan dengan alasan terjadinya perubahan mendasar yaitu perubahan kebijakan nasional.

Menimbang hal inilah maka dalam nota penjelasan pengantar laporan kinerja tahun 2017 turut pula disesuaikan dengan menjelaskan secara ringkas capaian kinerja 11 (sebelas) IKU Pembangunan Jawa Timur.

***PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI,***

Penyampaian laporan tahun 2017 ini sebagai manifestasi pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Mengingat dokumen RKPD memuat program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, hal ini mengandung arti bahwa materi laporan yang dipertanggungjawabkan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang disepakati bersama dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi dengan Nomor: 188/13/NK/013/2016 dan Nomor: 160/13/NK/060/2017 Tanggal 29 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2017, yang didukung dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi dengan Nomor: 188/14/NK/013/2016 dan Nomor: 160/14/NK/060/2017 Tanggal 29 September 2016 tentang Plafon Prioritas Anggaran (PPA) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 melalui Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Nomor: 188/6/NK/013/2017 dan Nomor: 188/6/NK/050/2017 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang dilengkapi dengan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 188/7/NK/013/2017 dan Nomor: 188/7/NK/050/2017 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Plafon Prioritas Anggaran (PPA) Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Dari landasan kesepakatan bersama tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan operasional program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran

APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Mengingat laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap dokumen RKPD Tahun 2017, oleh karenanya seluruh rangkaian capaian kinerja yang diukur, dapat mendeskripsikan tema RKPD Tahun 2017 yaitu **“Pembangunan Yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia Dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik”**. Tema ini sinergi dengan **tema pembangunan nasional** yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan tema **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”**.

Sinergitas tema RKPD Tahun 2017 dengan RKP tahun 2017 secara agregat mencerminkan adanya kesamaan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan prioritas program pembangunan dalam rangka



menuntaskan permasalahan-permasalahan aktual yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.

***Hadirin, Peserta Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,***

Total APBD Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah di Jawa Timur dari **Pos Penerimaan** sebesar 29,87 Trilyun Rupiah lebih atau 101,81 persen dari target sebesar 29,34 Trilyun Rupiah lebih. Total anggaran ini diperoleh dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pos Dana Perimbangan serta Pos Penerimaan dari Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

**I. Dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Target penerimaan PAD tahun 2017 sebesar 15,85 Trilyun Rupiah lebih, realisasi mencapai sebesar 17,32 Trilyun Rupiah lebih atau 109,31 persen. Penerimaan ini diperoleh dari Pajak Daerah sebesar 14,35 Trilyun Rupiah lebih, dari Retribusi Daerah sebesar 131,44 Milyar Rupiah lebih, kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 374,27 Milyar Rupiah lebih serta dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 2,47 Trilyun Rupiah lebih.

## **II. Dari Pos Dana Perimbangan**

Target penerimaan Dana Perimbangan tahun 2017 sebesar 13,49 Trilyun Rupiah lebih, realisasi mencapai sebesar 12,49 Trilyun Rupiah lebih atau 92,62 persen. Penerimaan ini diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 1,63 Trilyun, kemudian dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,80 Trilyun Rupiah lebih serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 7,05 Trilyun Rupiah lebih.

## **III. Dari Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Target penerimaan dari Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 sebesar 7,62 Milyar Rupiah lebih, realisasinya mencapai sebesar 58,63 Milyar Rupiah lebih atau 786,94 persen. Penerimaan ini diperoleh dari Pendapatan Hibah sebesar 38,17 Milyar Rupiah lebih, dan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 20,45 Milyar Rupiah lebih.

Kekuatan dana APBD Tahun Anggaran 2017 tersebut secara keseluruhan dialokasikan untuk **Pos Belanja Daerah** dengan target sebesar 30,93 Trilyun Rupiah lebih, terealisasi sebesar 28,89 Trilyun Rupiah lebih atau 93,39 persen. Dari total Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dengan target sebesar 20,66 Trilyun Rupiah lebih dengan realisasi mencapai sebesar

19,41 Trilyun Rupiah lebih atau 93,99 persen. Disisi lain, dialokasikan untuk Belanja Langsung dengan target sebesar 10,27 Trilyun Rupiah lebih, realisasinya mencapai sebesar 9,47 Trilyun Rupiah lebih atau 92,20 persen.

Dari sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dialokasikan sebesar 1,99 Trilyun Rupiah lebih, terealisasi sebesar 1,98 Trilyun Rupiah lebih atau 99,53 persen. Penerimaan dari pos SILPA Daerah Tahun sebelumnya sebesar 1,85 Trilyun Rupiah lebih, dari pos Pencairan Dana Cadangan sebesar 88,45 Milyar Rupiah lebih, dari pos Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar 38,54 Milyar Rupiah lebih, selanjutnya dari pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar 1,43 Milyar Rupiah lebih. Dari penerimaan ini dipergunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017 sebesar 408,33 Milyar Rupiah lebih, terealisasi sebesar 208,33 Milyar Rupiah lebih atau 51,02 persen.

***Pimpinan Sidang dan Segenap Anggota Dewan Yang Kami Hormati,***

Sebagaimana yang Saya sampaikan pada laporan tahun-tahun sebelumnya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan disajikan kedalam 3 (tiga) buku yaitu: Kesatu, Buku Nota Penjelasan Gubernur kepada DPRD

mengenai LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017; Kedua, Buku Substansi Laporan Pertanggungjawaban Gubernur atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Timur Tahun 2017 dan Ketiga, Buku Lampiran sebagai pelengkap buku laporan kedua yang memperlihatkan realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah.

Ketiga jenis buku laporan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan rangkaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur Tahun 2017 yang tidak terpisahkan, sehingga terkompilasi dalam satu rangkaian utuh yang menggambarkan capaian kinerja tahun 2017 secara keseluruhan.

Perlu kami informasikan bahwa ketiga buku tersebut telah kami sampaikan kepada Para Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum sidang paripurna ini berlangsung, melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 Maret 2018 Nomor: 045.2/3332/201.5/2018 tentang Penyampaian Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Ketiga buku laporan tersebut selanjutnya dipergunakan

sebagai bahan pencermatan dan pembahasan sekaligus rekonsiliasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sidang paripurna lanjutan, yang hasilnya akan disampaikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat pada sidang paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang akan datang.

Selanjutnya, untuk menyingkat waktu ijin saya menyampaikan pengantar laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa Timur tahun 2017 dalam bentuk format laporan Nota Penjelasan sebagai pengantar LKPJ Tahun 2017 yang mencerminkan laporan secara komprehensif. Nota Penjelasan pengantar laporan ini kami rangkai secara sederhana dan kami narasikan menjadi 2 (dua) bagian.

### ***Bagian Pertama, mengenai Capaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama***

Perlu kami sampaikan bahwa laporan kinerja tahun 2017 ini menyampaikan secara garis besar realisasi capaian kinerja 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Jawa Timur tahun 2017 terhadap target yang ditetapkan, meliputi:

**Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia,**

**Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan Sosial.**

Berikut ini kami sampaikan realisasi capaian 11 (sebelas) IKU Pembangunan Jawa Timur Tahun 2017, selengkapnya kami bacakan sebagai berikut:

**1. IKU Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia (termasuk Jawa Timur) mengacu pada sistem ekonomi 4 (empat) sektor, dimana kinerja perekonomian itu tidak saja ditentukan oleh kinerja internal dari wilayah lokal (Jawa Timur) saja, namun juga dipengaruhi kinerja Nasional dan bahkan Internasional.

Situasi ekonomi global yang belum menentu dan harga komoditas unggulan yang masih cenderung berfluktuasi memberikan dampak pada kinerja perekonomian Jawa Timur. Tekanan pada perekonomian makin terasa, karena konsumsi dan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan belum kembali kepada kinerja terbaiknya. Bahkan, kinerja konsumsi (daya beli)

yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 59,67 persen (tahun 2016) cenderung melambat, khususnya pada kelompok menengah bawah.

Dalam konteks perekonomian nasional, Indonesia hanya berada di bawah China dan India. Kalaulah dahulu China bisa tumbuh 12 persen, kini China hanya tumbuh 6 persen. Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang dulu mampu tumbuh 6 persen saat ini hanya tumbuh 3 persen. Perlu juga dicatat bahwa tidak banyak negara yang bisa mencapai pertumbuhan di level 5 persen, apalagi di tengah lanskap ekonomi dunia yang sedang menuju era normal baru (*new normal*). Pertumbuhan rendah telah menjadi kondisi normal baru dalam beberapa tahun ke depan, dan Presiden RI menyatakan bahwa era New Normal pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5 persen (Seperti yang disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) tahun 2017). Bahkan diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan di tengah kompetisi global, industrialisasi dan perdagangan agak sulit mendorong ekonomi akibat pelemahan dan kebijakan proteksi negara Amerika yang didukung Uni Eropa.

Fenomena baru inilah yang juga terjadi dan berpengaruh signifikan kepada sedikit melambatnya perekonomian Jawa Timur. Sepanjang tahun 2017, perekonomian Jawa Timur menghadapi sejumlah tantangan baik eksternal maupun domestik sehingga laju pertumbuhan menjadi sangat terbatas. Di kondisi itu, Nilai Tambah Bruto PDRB ADHB senilai 2.019,20 Trilyun Rupiah dan ADHK 2010 Jawa Timur sebesar 1.482,15 Trilyun Rupiah dan apabila dibandingkan dengan PDRB ADHK tahun 2016 sebesar 1.405,56 Trilyun Rupiah maka nilai tambah bruto ini meningkat sebesar 5,45 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini sedikit melambat dibanding tahun 2016 yang mencapai 5,55 persen. Meski demikian, kondisi ini juga diiringi kinerja inflasi di Jawa Timur tahun 2017 yang terkendali rendah yaitu 4,04 persen. Diharapkan dengan inflasi rendah, maka daya beli masyarakat akan semakin tinggi, namun yang terjadi kelebihan pendapatannya lebih cenderung ditabung (sebagai investasi). Inflasi yang terkendali pada level yang rendah dan stabil tersebut memberikan suasana yang kondusif bagi upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi domestik.

Jika dilihat dari struktur perekonomiannya kontribusi sektor tersier semakin besar menggeser peran kelompok sektor primer



(terutama Pertanian) yang sepanjang tahun 2017 banyak diwarnai ketidak-pastian musim, kegagalan panen dan serangan hama penyakit serta musibah bencana alam banjir dan tanah longsor. Distribusi kategori lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi 29,03 persen terhadap total PDRB Jawa Timur, yang diikuti Perdagangan 18,18 persen dan Pertanian 12,80 persen. Kinerja yang menggembirakan adalah kategori lapangan usaha Industri Pengolahan sebagai *leading sector* yang tumbuh 5,69 persen lebih tinggi dibanding total pertumbuhan induk/PDRB-nya (5,45 persen). Industri Pengolahan yang tumbuh lebih tinggi menggambarkan mulai bergairahnya kembali industrialisasi di Jawa Timur yang sempat melamban c to c s/d Triwulan III 2017 serta "*wait and see*" menunggu perkembangan perekonomian Global. Fenomena ini juga mendorong tercukupinya input industri dari kelompok sektor primer terutama kategori pertambangan (tumbuh 7,47 persen) serta memicu pertumbuhan tinggi (melebihi pertumbuhan induk PDRBnya) pada kelompok sektor tersier seperti perdagangan sebesar 6,26 persen, Konstruksi sebesar 6,91 persen, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 7,91 persen, transportasi dan

perdagangan sebesar 6,62 persen, informasi dan telekomunikasi sebesar 6,92 persen, serta jasa perusahaan sebesar 5,53 persen.

Untuk kategori Lapangan Usaha Pertanian disamping kontribusinya menurun (dibanding tahun 2016 sebesar 13,43 persen) pertumbuhannya pun juga melambat dari 2,41 persen di tahun 2016 menjadi 1,48 di tahun 2017. Kondisi ini lebih dipengaruhi ketidak-pastian musim, serangan hama dan terjadinya bencana alam. Sedangkan struktur PDRB menurut pengeluaran ditandai dengan menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga menjadi 59,14 persen yang tumbuh sebesar 4,54 persen serta terjadinya kenaikan kinerja investasi yang kontribusinya menjadi 28,16 persen dan tumbuh sebesar 6,07 persen.

Secara umum meski pertumbuhan di tahun 2017 sedikit melambat, namun tetap berada di atas pertumbuhan nasional (5,07 persen) dengan kontribusinya dalam konstelasi nasional tetap terbesar kedua atau sebesar 14,99 persen atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 14,44 persen. Kualitas Pertumbuhan ini juga mengarah kepada pertumbuhan inklusif mengingat kinerjanya diikuti dengan menurunnya jumlah

penduduk miskin, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia serta berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka.

## **2. IKU Indeks Gini**

Indeks Gini Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir masih berada pada tingkat sedang, yaitu di kisaran 0,30 – 0,50 hal ini nampak dari capaian Indeks Gini Jawa Timur Tahun 2017 sebesar 0,41 masih sedikit diatas target tahun 2017 sebesar 0,39 – 0,40 yang artinya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat jawa timur masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Namun demikian gini ratio di pedesaan yang lebih baik sebesar 0,31 lebih kecil dibanding dengan gini ratio di perkotaan sebesar 0,44.

Penyebab meningkatnya ketimpangan di Jawa Timur pada tahun 2017 antara lain karena terjadinya peningkatan pendapatan untuk kelompok 40 persen menengah, dan kelompok 20 persen berpenghasilan tinggi, tidak sebanding dengan kecepatan peningkatan 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi lebih cepat tidak mampu diimbangi kenaikan pendapatan 40 persen kelompok masyarakat menengah dan 40 persen kelompok berpenghasilan rendah.

Di sisi lain penyebab dari meningkatnya gini rasio bisa pula disebabkan karena akses masyarakat terhadap fasilitas keuangan masih rendah, atau masih tingginya *unbank people*. Saat ini, fasilitas keuangan hanya 16 kantor per 100 ribu penduduk. Rasio kredit terhadap PDB pun masih 33,6 persen (sumber: Bank Indonesia). Akibatnya, masyarakat menengah dan bawah kesulitan menampung aset, atau habis untuk keperluan sehari-hari.

Berbagai kebijakan dan program lintas sektor terkait yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kota dari tahun ke tahun telah dilaksanakan terutama dalam distribusi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru hingga ke pelosok perdesaan, pemerataan upah buruh dan program-program penunjang pengentasan kemiskinan. Faktor kinerja sektoral juga berpengaruh ketika di tahun 2017 ini nilai tambah kategori lapangan usaha pertanian yang didominasi penduduk berpenghasilan rendah hanya tumbuh 1,48 persen, sementara penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi yang banyak bergerak di lapangan usaha Industri yang tumbuh 5,69 persen dan perdagangan yang tumbuh 6,26 persen mengalami

pertumbuhan yang relatif lebih cepat bahkan melebihi pertumbuhan induknya.

Berbagai kebijakan dan program lintas sektor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun sebenarnya sudah cukup efektif dan memperlihatkan adanya perubahan distribusi pendapatan walaupun masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan signifikan terhadap distribusi pendapatan masyarakat pada prinsipnya dapat diwujudkan melalui aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh seluruh komponen masyarakat.

Untuk mendorong capaian Indeks Gini tahun 2017 dari ketimpangan sedang menjadi ketimpangan rendah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memobilisir aktivitas seluruh komponen masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas sumber daya pendukung lainnya baik pada tataran Regulasi, Kebijakan, Anggaran, maupun Sarana dan Prasarana, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan faktor produksi yang bernilai ekonomi tinggi, berdaya saing, konsisten dan sustainable.

### **3. IKU Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Selain gini ratio ukuran ketimpangan lain yang digunakan adalah persentase distribusi pengeluaran penduduk pada

kelompok 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Pengelompokan pemerataan pendapatan versi bank dunia tersebut meliputi 3 (tiga) kategori yaitu kategori ketimpangan Rendah (di atas 17 persen), kategori ketimpangan Sedang (antara 12 – 17 persen) dan kategori ketimpangan Tinggi (dibawah 12 persen).

Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (kelompok 40 persen Terbawah) pada Tahun 2017 mencapai sebesar 16,49 persen, besaran capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 18,00 – 18,20 persen. Sementara itu berdasarkan pengelompokan kategori ketimpangan, pada tahun 2017 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Sedangkan untuk kelompok 20 persen keatas mencapai sebesar 48,45 persen dan kelompok 40 persen menengah mencapai sebesar 35,06 persen.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah ketimpangan adalah sebagai berikut:

Pertama, melalui skema pembiayaan perbankan berupa program *credit linkage* sektor industri primer. Penyaluran kredit yang berasal dari dana APBD Provinsi dalam bentuk *Loan Agreement* ke Bank Jatim yang disalurkan secara bertahap dan

sesuai kebutuhan dengan Program Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dana ini selanjutnya digunakan sebagai modal bagi pengusaha Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diprioritaskan pada UMKM berbasis industri primer yaitu usaha yang mengambil bahan baku di sektor pertanian dengan penyediaan suku bunga murah. Skema pembiayaan inilah yang menjadi rintisan pada tahun berikutnya direalisasikan dalam program nilai tambah hulu-hilir agromaritim. Prinsipnya adalah bahwa nilai tambah dari pengembangan UMKM harus bergulir merata hingga di desa.

Kedua, melalui peningkatan mutu pelayanan dasar melalui program pendidikan usia produktif dan tenaga pengajar, peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SMK Mini untuk meningkatkan tenaga kerja siap pakai terutama untuk memperkuat sektor industri khususnya industri primer. Dari sektor kesehatan, pendekatan program yang dilaksanakan adalah Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Ketiga, melalui pemerataan pertumbuhan secara kewilayahan. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan

percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas baik darat, laut dan udara, penyediaan sarana dan prasarana minimal yaitu Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta pengelolaan kawasan strategis provinsi sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat memberikan dampak terhadap pengembangan wilayah di sekitarnya.

*Peserta Sidang Paripurna Yang Kami Hormati, berikutnya indikator ke-*

#### **4. IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga variabel dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya variabel tersebut diukur dengan beberapa indikator. Variabel kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), variabel pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan standar hidup layak digambarkan melalui pengeluaran per kapita.



Berdasarkan pengukuran ketiga variabel tersebut, capaian kinerja IPM Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2016 IPM Jawa Timur sebesar 69,74 dan pada tahun 2017 diperkirakan meningkat mencapai angka diatas 70, masuk dalam kategori tinggi. Perkiraan capaian IPM 2017 ini masih menunggu rilis dari BPS pada bulan Maret 2018. Capaian ini melampaui target IPM yang ditetapkan pada RPJMD yaitu sebesar 69,50 – 69,75.

Besaran capaian IPM ini mengindikasikan dampak kinerja pembangunan di Jawa Timur semakin membaik. Di sisi lain, pada konteks perencanaan pembangunan, capaian IPM tersebut juga berfungsi sebagai *guiden* untuk menentukan prioritas serta merumuskan kebijakan dan program selanjutnya.

Dilihat dari capaian IPM tahun 2017, maka untuk variabel Indikator Pendidikan tercermin dari capaian Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencapai sebesar 7,23 tahun pada tahun 2016, sedangkan tahun 2017 yang masih menunggu rilis dari BPS pada bulan Maret 2018, diperkirakan akan naik kembali menjadi 7,29 tahun. Untuk meningkatkan kinerja IPM yang masuk kategori tinggi, maka dukungan kinerja program terkait indikator Pendidikan, diantaranya Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan indikator Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar yang mencapai 95,36 persen atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95,36 persen dan Program Pendidikan Menengah dengan indikator Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah yang mencapai 82,80 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80,09 persen.

Selanjutnya, variabel Indikator Kesehatan tercermin dari capaian Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2017 sebesar 71,00 tahun. Kondisi tersebut didukung melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar Sesuai Standar yang mencapai 41,7 persen (402 puskesmas) atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 14 persen (135 puskesmas) dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Prevalensi Balita Gizi Buruk yang mencapai 0,74 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,9 persen.

Kemudian, variabel Indikator Pendapatan/Indeks Daya Beli Masyarakat tahun 2017 mencapai sebesar 10,72<sup>\*)2016</sup> juta per tahun (angka sangat sementara). Hal ini didukung salah satunya dengan kenaikan volume penjualan Koperasi Usaha Kecil

Menengah (KUKM) difasilitasi pemasarannya, yaitu sebesar 40,19 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 5 persen.

## **5. IKU Persentase Penduduk Miskin**

Capaian Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur per September 2017 sebesar 11,20 persen atau turun sebesar 0,57 persen dibanding Maret 2017 sebesar 11,77 persen, sedangkan Nasional turun sebesar 0,52 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 penurunan kemiskinan bulan Maret 2016 sampai dengan bulan September 2017 turun sangat signifikan yaitu sebesar 0,85 persen, sedangkan Nasional turun sebesar 0,74 persen. Capaian tingkat kemiskinan Jawa Timur pada September 2017 ini melampaui target kemiskinan yang terdapat dalam RPJMD yaitu sebesar 11,80 – 11,50 persen.

Secara absolut jumlah penduduk miskin Jawa Timur selama periode Maret-September 2017 juga mengalami penurunan sebanyak 211.740 jiwa, dari 4.617.010 jiwa pada Maret 2017 menjadi 4.405.270 jiwa pada September 2017. Sedangkan apabila dibandingkan dari Maret 2016 sampai dengan September 2017, menurun signifikan yaitu sebanyak 298.303 jiwa, dari 4.703.300 jiwa pada Maret 2016 menjadi 4.405.270 jiwa pada September 2017. Adapun persentase penduduk miskin di daerah

perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,87 persen turun menjadi 7,13 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 15,82 persen turun menjadi 15,58 persen pada September 2017.

Program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu melalui :

Pertama, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui Bantuan Pangan/Beras; Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM); Bosda Madin; Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui strategi antara lain Jalinmatra; *Anti Poverty Program*; Peningkatan Akses Pelayanan Sanitasi dan Pelayanan Air Minum Layak; Koperasi Wanita dan Koperasi Pondok Pesantren.

Ketiga, sinergitas program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH); Beras Sejahtera (Rastra); serta Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

## **6. IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2017 mencapai sebesar 92,39 (angka sangat sementara) atau mencapai target sebagaimana yang ditetapkan sebesar 92,39 - 92,90. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesetaraan gender. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan gender, antara lain dapat dilihat melalui Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang mencapai 33,24 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 22 persen dan Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja-PUG) yang mencapai 100 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 15 persen.

## **7. IKU Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Capaian Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur, pada Bulan Agustus Tahun 2016 sebesar 4,21 persen, dan Bulan Agustus Tahun 2017 sebesar 4,00 persen sehingga mengalami penurunan sebesar 0,21 persen. Hal ini berarti capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu sebesar 4,17 – 4,08 persen. Dari sisi jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebanyak 984

ribu orang dari 19,95 juta orang pada Agustus tahun 2016 meningkat menjadi 20,94 juta orang pada Agustus tahun 2017. Sedangkan jumlah pengangguran mengalami penurunan sebanyak 787 orang dari 839.283 orang pada Agustus tahun 2016 menjadi 838.496 orang pada Agustus 2017.

Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tahun 2017 didukung oleh membaiknya kinerja program yang dilaksanakan antara lain Pelatihan berbasis kompetensi/keterampilan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan keterampilan; Penempatan tenaga kerja melalui kegiatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Lokal (AKL) dan sektor informal dengan selalu melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota, Bursa Kerja Khusus (BKK) di UPT Pelatihan Kerja, BKK SMK dan BKK Perguruan tinggi di Jawa Timur, serta Penempatan tenaga kerja magang di luar negeri.

*Peserta Sidang Paripurna Yang Kami Hormati, berikutnya indikator ke-*

## **8. IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Sebagai instrumen untuk mengetahui kompleksitas dampak lingkungan terhadap perkembangan kondisi kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan, pada tahun 2017 ditetapkan Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator baru sebagai pengganti indikator pada tahun sebelumnya, yaitu indikator kualitas air yang terdiri dari *Biological Oxygen Demand (BOD)* dan *Chemical Oxygen Demand (COD)*.

Secara khusus, penetapan IKLH sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur berfungsi sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan serta bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian target di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur tahun 2017 sebesar 66,29, hasil ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2014 – 2019 maupun RPJMN 2015 - 2019, yaitu 63,98 – 65,49 untuk RPJMD dan 65,00 – 65,50 untuk RPJMN. Capaian IKLH sebesar 66,29 diperoleh dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan capaian masing-masing untuk IKA sebesar 52,77 untuk IKU sebesar 85,49 dan untuk ITL sebesar 62,02. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur sudah lebih baik.

Kedepan dalam rangka meningkatkan capaian IKLH, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui kegiatan penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan penerapan izin dan hukum lingkungan serta pelayanan uji kualitas lingkungan.

## **9. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Definisi dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat Jawa Timur Tahun 2017 sebesar 81,33 mencapai target yang ditetapkan sebesar 81,00 – 82,00. Hal ini membuktikan bahwa misi Jawa Timur untuk memberikan tingkat pelayanan yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat Jawa Timur tidak sekedar wacana,



melainkan benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan langsung oleh semua elemen masyarakat. Sebagai pendukung capaian kinerja tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan ditunjukkan dengan perolehan apresiasi penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Enam Penghargaan Top 99 (sembilan sembilan) Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2017. Penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras seluruh komponen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus melakukan inovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Penghargaan ini menambah kepercayaan dan motivasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.

## **10. IKU Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*, dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi bertujuan untuk

mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik. Berkaitan pertimbangan pemikiran tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memasukkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Timur Tahun 2017 sebesar 69,54 mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 65,00 – 67,00.

Capaian ini sangat membanggakan karena setidaknya dapat mencerminkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan telah dapat diimplementasikan dalam tatanan pemerintahan daerah yang semakin profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa Timur dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis.

## **11. IKU Indeks Kesalehan Sosial**

Indeks Kesalehan Sosial merupakan indikator baru dalam RPJMD Tahun 2014-2019, filosofinya adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan/shaleh atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diukur dengan solidaritas sosial, toleransi, mutualis/kerjasama, adil dan stabilitas.

Capaian Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur Tahun 2017 sebesar 62,34 besaran indikator ini mencapai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar diatas 60.

Demikian laporan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang secara garis besar direpresentasikan melalui capaian sebelas indikator kinerja utama (IKU). Kami menyadari sepenuhnya upaya maksimal yang telah kami tempuh masih terdapat beberapa kekurangan yang masih diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap fokus program dan kegiatan kedepan. Berdasarkan capaian sebelas IKU, ada delapan IKU yang telah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks

Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan Sosial, sedangkan tiga IKU lainnya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini dan Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia masih perlu upaya untuk optimalisasi percepatannya walaupun ketiga indikator tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal.

*Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Kami Hormati,*

Berikutnya,

*Bagian Kedua, mengenai Penghargaan Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017*

Selama penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 telah menerima sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis penghargaan, yang dapat dikelompokkan ke dalam **10 (Sepuluh) bidang penghargaan**. Selengkapny kami bacakan sebagai berikut:

#### **A. Penghargaan Bidang Pemerintahan**

##### **1) ASTHA BRATA MADYA UTAMA PAMONG PRAJA**

Penghargaan ini diberikan kepada Kepala Daerah (Gubernur) selaku Pamong Praja sejati yang mampu mengamalkan ajaran Astha Brata yang berisikan 8 (delapan) nilai utama yakni matahari, bulan, bintang, angin, langit, api, samudera

dan bumi. Pemberian penghargaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung tanggal 23 Januari 2017.

## **2) LENCANA ALUMNI KEHORMATAN PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN**

Penghargaan diberikan atas pengakuan dan kemampuan Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan.

## **3) PROVINSI BERKINERJA TERBAIK TERTINGGI NASIONAL**

Penghargaan diberikan karena Provinsi Jawa Timur dinilai oleh Pemerintah Pusat berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, pada tanggal 25 April 2017.

## **4) PENGHARGAAN BIDANG INOVASI PEMERINTAHAN**

Penghargaan atas inovasi kebijakan pembiayaan alternatif dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri BAPPENAS/PPN, pada tanggal 26 April 2017.

## **5) LEADERSHIP AWARD TAHUN 2017**

Diberikan kepada Kepala Daerah yang dinilai sebagai seorang Gubernur yang memiliki *best practice* kepemimpinan. Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 18 Desember 2017.

## **6) INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2017**

Penghargaan ini diberikan karena kebijakan inovasi dalam rangka untuk memperbaiki capaian kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdampak pada meningkatnya indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap reformasi birokrasi. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 18 Desember 2017.

## **7) ANUGERAH KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TAHUN 2017**

Penghargaan atas penilaian kategori Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan *Assessment Center* bagi Instansi Pemerintah. Penghargaan diberikan oleh Ketua Komisi

Aparatur Sipil Negara (KASN), pada tanggal 28 Desember 2017.

## **B. Penghargaan Bidang Keuangan**

### **1) PENGGERAK TIM PENGELOLA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH (TPAKD) TELADAN 1 TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016**

Penghargaan ini merupakan apresiasi Pemerintah kepada Kepala Daerah yang dinilai sebagai Tokoh atau Gubernur Inspiratif Penggerak TPAKD Teladan 1 Tingkat Nasional Tahun 2016. Penghargaan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, pada tanggal 13 Januari 2017.

### **2) PENGHARGAAN CAPAIAN STANDAR TERTINGGI ATAU WAJAR TANPA PENGECUALIAN TERHADAP (LKPD) TAHUN 2016**

Apresiasi ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, dinilai telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan, sehingga layak diberikan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan diserahkan oleh Kepala

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan di Surabaya, pada Tanggal 1 Nopember 2017.

### **3) DANA RAKCA GOLD AWARDS**

Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai telah memenuhi berbagai kriteria utama dalam rangka penetapan PERDA APBD tepat waktu serta mendapatkan opini WTP atau WDP dari BPK. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor, pada tanggal 6 Desember 2017.

## **C. Penghargaan Bidang Ekonomi**

### **1) PENGGERAK KOPERASI TERBAIK**

Penghargaan ini diberikan karena dinilai sebagai provinsi penggerak koperasi terbaik dan penumbuhan kewirausahaan. Penghargaan diberikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pada tanggal 23 Maret 2017.

### **2) TOKOH UTAMA PENGGERAK KOPERASI**

Penghargaan ini bentuk apresiasi karena konsisten melaksanakan kebijakan strategis yang berpihak pada usaha menengah kebawah dengan mengembangkan dan memberdayakan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan



Menengah (UMKM). Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), pada tanggal 12 Juli 2017.

#### **D. Penghargaan Bidang Pembangunan**

##### **1) SAMKARYA PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA**

Penghargaan diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai berperan besar dalam mendorong dan menggerakkan institusi pemerintah atau organisasi di jajarannya untuk berkreasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini sudah 3 (tiga) kali berturut-turut dan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 12 Oktober 2017.

#### **E. Penghargaan Bidang Pelayanan Publik**

##### **1) TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Penghargaan ini diberikan karena kebijakan inovasi pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah yang dikemas dalam model pelayanan satu atap terbukti cukup efektif dan efisien. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), pada tanggal 20 Mei 2017.

## **F. Penghargaan Bidang Pariwisata**

### **1) INDONESIA'S ATTRACTIVENESS AWARD (IAA) TAHUN 2017**

Penghargaan karena Provinsi Jawa Timur dinilai mampu berinovasi dalam bidang pengembangan investasi, infrastruktur, pariwisata, dan pelayanan publik, yang berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian daerah. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pariwisata, pada tanggal 29 September 2017.

## **G. Penghargaan Bidang Ketenagakerjaan**

### **1) PENGHARGAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Apresiasi ini diberikan karena dinilai berhasil sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik. Penghargaan diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada tanggal 19 Juli 2017.

### **2) PRODUKTIVITAS PARAMAKARYA TAHUN 2017**

Apresiasi ini diberikan atas peran besar Gubernur dalam melakukan upaya pembinaan serta menggerakkan perusahaan-perusahaan di Jawa Timur agar tetap eksis berproduksi dan berperan serta secara aktif dalam proses

pembangunan daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah. Penghargaan diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 2017.

## **H. Penghargaan Bidang Perlindungan Anak**

### **1) PROVINSI PENGGERAK KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

Apresiasi ini diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai mampu mengkoordinasikan kabupaten/kota di wilayahnya berkaitan dengan pemenuhan hak anak serta perlindungan pada anak. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 22 Juli 2017.

### **2) PROVINSI PEDULI ANAK JALANAN DAN LAYANAN ANAK TERINTEGRATIF**

Apresiasi ini diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai memiliki kepedulian yang tinggi terhadap anak jalanan serta pemberian pelayanan kepada anak secara terintegratif. Penghargaan diberikan oleh Menteri Sosial, pada tanggal 20 Nopember 2017.

## **I. Penghargaan Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup**

### **1) PEMBINA TAGANA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017**

Penghargaan ini mencerminkan bahwa manajemen pembinaan kepada jajaran pemerintah daerah provinsi maupun jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota dan seluruh *stakeholder* cukup efektif dan mampu mengatasi kejadian bencana maupun Pasca Bencana. Penghargaan diberikan oleh Menteri Sosial, pada tanggal 24 Maret 2017.

### **2) NIRWASITA TANTRA**

Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi terhadap arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mempertimbangkan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penghargaan diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tanggal 2 Agustus 2017.

## **J. Penghargaan Non-Pemerintah Bersifat Nasional**

### **1) KATEGORI SPECIAL AWARD PWI JATIM**

Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan program-program

pembangunan daerah. Penghargaan diberikan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, pada tanggal 29 Maret 2017.

## **2) TOKOH BIDANG PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH**

Penghargaan diberikan atas kategori penilaian sebagai pendorong akselerasi pertumbuhan keuangan syariah. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 30 Mei 2017.

## **3) PEMBINA BANK PEMBANGUNAN DAERAH TERBAIK INDONESIA**

Penghargaan ini diapresiasi karena dinilai sebagai Pembina Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Indonesia Tahun 2017. Penghargaan diberikan oleh Majalah Economic Review, pada tanggal 23 Agustus 2017.

## **4) AKUNTAN AWARD 2017**

Penghargaan ini diberikan karena keberhasilan semua pihak, baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Tim Work maupun Masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan mengenai pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penghargaan diserahkan oleh Dewan Pengurus

Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia (DPN-IAI), pada tanggal 14 Desember 2017.

Penghargaan yang diperoleh selama tahun 2017 ini, merupakan dukungan dari semua pihak terutama Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.

***Hadirin, Peserta Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,***

Pada kesempatan sidang paripurna hari ini, terhadap LKPJ 2017 yang telah Saya sampaikan, mohon dengan hormat kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat untuk memberikan pencermatan dan kritik serta saran konstruktif terhadap capaian kinerja tahun 2017, sehingga dapat menjadikan perbaikan kinerja tahun 2018 dan 2019 mendatang. *Checks and Balances* yang dilakukan oleh Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat akan menjadi dorongan semangat yang kuat sekaligus sebagai bekal kami untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih berkualitas.

Demikian beberapa hal penting yang dapat Saya sampaikan secara garis besar mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2017.

Saya selaku Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh Jajaran Perangkat Daerah atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian nota penjelasan dan seluruh laporan kinerja tahun 2017 yang kami sampaikan, terdapat kekurangan dan kesalahan baik pada narasi substansi materi, data-data pendukung maupun kesalahan yang sifatnya redaksional.

Akhir kata, Saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat telah memenuhi jumlah quorum sesuai yang ditentukan dalam tata tertib persidangan DPRD, sehingga sidang paripurna dapat diterima dan dilanjutkan ke sidang paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur.

*Akhirul Kalam, Waa Billaahii Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**Dr. H. SOEKARWO**